

Memahami Diplomasi Aktor Non-Negara Warisan Konferensi Bandung

Randy Wirasta Nandyatama

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, randy.wirasta@ugm.ac.id

ABSTRAK

Konferensi Bandung menandai perubahan penting dalam praktik diplomasi global. Meskipun berdampak besar dalam politik antarnegara, tulisan ini menyoroti elemen lain dari penyelenggaraan Konferensi Bandung, yakni pentingnya pengakuan terhadap inisiatif diplomasi yang dilakukan oleh aktor non-negara melalui pendekatan “diplomasi baru” (*new diplomacy*). Berbasis studi literatur dan *process tracing*, tulisan ini secara khusus mengkaji dan membandingkan strategi dua organisasi yang terkait erat dengan Konferensi Bandung, yaitu Afro-Asian People's Solidarity Organization (AAPSO) dan Afro-Asian Journalists Association (AAJA). Artikel ini menunjukkan bagaimana aktivisme transnasional dari aktor non-negara terutama dalam memanfaatkan kesempatan politik, membangun institusi, dan mensosialisasikan agendanya berkontribusi dalam menciptakan praktik diplomasi alternatif di ranah internasional.

Kata Kunci: Konferensi Bandung, diplomasi, aktor non-negara, aktivisme transnasional

ABSTRACT

The Bandung Conference marked a significant transformation in the practice of global diplomacy. While it had a major impact on interstate politics, this paper highlights another important element of the Bandung Conference, namely the recognition of diplomatic initiatives conducted by non-state actors through the approach of “new diplomacy.” Based on literature study and process tracing, this paper specifically examines and compares the strategies of the Afro-Asian People's Solidarity Organization (AAPSO) and the Afro-Asian Journalists Association (AAJA) as two organizations closely linked to the Bandung Conference. The article demonstrates how the transnational activism of non-state actors, particularly in seizing political opportunities, institutionalization, and socializing their agendas, contributed to the creation of alternative diplomatic practices in the international sphere.

Keywords: Bandung Conference, diplomacy, non-state actors, transnational activism

Pendahuluan

Secara tradisional, diplomasi dipahami sebagai praktik yang berfokus pada tindakan negara dalam hubungan internasional. Pandangan ini telah mengakar kuat dan menyebabkan pembahasan mengenai diplomasi cenderung terbatas pada upaya maksimalisasi kapasitas negosiasi untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara.¹ Pandangan ini juga berlaku bagi negara-negara berkembang di kawasan Dunia Selatan (*Global South*). Konferensi Asia-Afrika tahun 1955, atau yang lebih dikenal sebagai “Konferensi Bandung,” acapkali dimaknai sebagai keberhasilan para diplomat dan pemimpin negara-negara berkembang dalam menyatukan suara kawasan Dunia Selatan.² Namun, apabila ditelaah lebih mendalam, praktik diplomasi tidak sesederhana sekadar keterampilan negosiasi. Ia juga merupakan representasi dari dinamika aktor yang lebih luas. Warisan semangat “Bandung”

¹ Lihat Satow, E., 1917, *A Guide to Diplomatic Practice*, Longmans, Green & Co, London; Nicolson, H, 1939. *Diplomacy*, Oxford University Press, London.

² Lihat Fitzgerald, C. P., 1955. “East Asia after Bandung,” *Far Eastern Survey*, 24(8); Berger, M. T., 2004, *The Battle for Asia: From Decolonization to Globalization*, Routledge Curzon, London.

bukanlah milik eksklusif negara-negara penginisiasi, tetapi juga merupakan hasil dari keterlibatan jaringan masyarakat sipil dari negara-negara berkembang. Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang praktik diplomasi negara-negara berkembang dengan menggunakan pendekatan *multi-track diplomacy*, di mana aktor-aktor pelaksana diplomasi mencakup komunitas yang lebih beragam.³

Konferensi Bandung lahir dalam konteks politik internasional yang sangat khas. Saat itu, dunia tengah berada dalam ketegangan Perang Dingin, yang ditandai oleh perebutan pengaruh antara dua blok ideologi besar: Barat dengan ideologi liberal-kapitalis, dan Timur dengan ideologi komunis. Dalam situasi global yang terpolarisasi tersebut, Konferensi Bandung menjadi peristiwa penting yang menginspirasi terbentuknya kekuatan alternatif, yakni Gerakan Non-Blok (GNB). Sejumlah penelitian bahkan menempatkan Konferensi Bandung yang dihadiri oleh 29 negara Asia dan Afrika sebagai tonggak sejarah ketika negara-negara berkembang mampu menjalin solidaritas dan memperkuat posisi kolektif mereka dalam tatanan internasional.⁴

Secara khusus, Konferensi Bandung merepresentasikan semangat yang dihadapi oleh negara-negara pascakolonial, seperti promosi kerja sama di isu-isu ekonomi dan kebudayaan, penghapusan kolonialisme dan rasisme, serta kontribusi Asia-Afrika dalam menciptakan perdamaian dunia.⁵ Rumusan “Dasasila Bandung” kemudian menjadi referensi utama bagi prinsip-prinsip politik internasional yang diidealkan oleh negara-negara berkembang.⁶ Tidak berlebihan jika konferensi ini dianggap sebagai tonggak awal keberhasilan diplomasi kolektif negara-negara Global South untuk membangun jaringan serta menyuarakan posisi mereka di panggung dunia.

Meskipun gaung Konferensi Bandung tidak lagi sekuat dekade-dekade sebelumnya,⁷ masih terdapat sejumlah fenomena penting yang layak dikaji. Salah satunya adalah kenyataan bahwa sejalan dengan upaya aktor-aktor negara melalui diplomasi konvensional, dalam perkembangannya Konferensi Bandung memunculkan pula berbagai jaringan dan organisasi yang melibatkan aktor non-negara, seperti *Afro-Asian Journalist Conference* (AAJA) dan *Afro-Asian People's Solidarity Conference* (AAPSO). Kedua jaringan ini lahir setelah pelaksanaan Konferensi Bandung dan mencerminkan perluasan semangat solidaritas Asia-Afrika ke luar struktur formal negara dan masuk ke ranah masyarakat sipil.

Menarik untuk menelusuri bagaimana organisasi masyarakat sipil berbasis semangat negara berkembang memainkan peran dalam membentuk hubungan internasional dan bagaimana mereka membangun komunikasi transnasional yang selaras dengan prinsip Dasasila Bandung. Tulisan ini secara khusus akan menelaah dua organisasi yang lahir dari inisiatif pasca-Konferensi Bandung, yaitu *Afro-Asian Journalists Association* (AAJA) yang lahir pada tahun 1963 dan *Afro-Asian People's Solidarity Organization* (AAPSO) yang lahir di tahun 1958. Keduanya tidak hanya menyelenggarakan konferensi secara rutin, tetapi juga berhasil membentuk organisasi permanen. Namun, bila AAJA mengalami kevakuman akibat berbagai tekanan politik domestik dan internasional, AAPSO mampu bertahan hingga hari ini.

Fokus utama tulisan ini adalah menelaah praktik diplomasi kontemporer yang dilakukan oleh kedua organisasi tersebut sebagai aktor non-negara. Mengacu pada konsep “*new diplomacy*” yang

³ Diamond, L., & McDonald, J., 1996, *Multi-track Diplomacy: A System Approach to Peace*, Kumarian Press, Sterling.

⁴ Huei, P. Y., 2009, “The Four Faces of Bandung: Detainees, Soldiers, Revolutionaries and Statesmen,” *Journal of Contemporary Asia*, 39(1).

⁵ Walker, D., 2005, “Nervous Outsider,” *Australian Historical Studies*, 36(125).

⁶ Lihat Acharya, A., 2009, *Whose Ideas Matter? Agency and Power in Asian Regionalism*, ISEAS, Singapore; Lee, C., 2005, “‘Bandung and Beyond’: Rethinking Afro-Asian Connections during the Twentieth Century,” *African Affairs*, 104(417).

⁷ Lihat Pauker, G. J., 1965, “The Rise and Fall of Afro-Asian Solidarity,” *Asian Survey*, 5(9); Herrera, R., 2005, “Fifty Years after the Bandung Conference: Towards a Revival of the Solidarity between the Peoples of the South? Interview with Samir Amin,” *Inter-Asia Cultural Studies*, 6(4).

dikemukakan oleh Bertrand Badie dan juga “*new transnational activism*” dari Sidney Tarrow,⁸ artikel ini akan mengidentifikasi bentuk-bentuk diplomasi yang dilakukan oleh jaringan organisasi masyarakat sipil tersebut. Selain itu, artikel ini juga berupaya menelaah ulang relevansi Konferensi Bandung dalam memahami diplomasi negara-negara berkembang di era kontemporer. Dengan memetakan proses dan struktur sejak era Perang Dingin hingga hari ini, tulisan ini berusaha memberikan pembacaan baru terhadap dinamika diplomasi yang mencakup seluruh elemen, baik negara maupun non-negara.

Secara khusus, artikel ini berisi lima bagian utama. Pertama, bagian pengantar yang mendiskusikan pentingnya fokus permasalahan. Kedua, bagian tinjauan pustaka yang berfokus pada pentingnya kerangka *new diplomacy* dan *new transnational activism* dalam memahami peran aktor non-negara dalam politik global. Ketiga, bagian metodologi penelitian yang berfokus pada penjelasan penggunaan studi literatur dan process tracing dalam memahami dinamika diplomasi yang dijalankan AAJA dan AAPSO. Bagian keempat mengulas analisis perbandingan kemampuan aktivisme transnasional AAJA dan AAPSO dalam menggambarkan peran aktor non-negara dari *Global South*. Kelima, bagian kesimpulan yang berfokus pada pentingnya memahami peran aktor non-negara sebagai praktik diplomasi alternatif di dalam kancah politik internasional.

Tinjauan Pustaka: Diplomasi Aktor Non-Negara dalam Konteks Konferensi Bandung

Memahami praktik diplomasi adalah proses yang kompleks dan multiperspektif. Hal ini disebabkan oleh sifat konsep diplomasi itu sendiri yang merupakan *essentially contested concept*, yaitu konsep yang penggunaannya masih menjadi perdebatan, khususnya terkait dengan bagaimana diplomasi seharusnya dipahami dan dijalankan. Perdebatan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui bukti empiris, penjelasan semantik, atau logika semata. Bagian ini mendiskusikan sejarah perdebatan dalam literatur mengenai diplomasi yang berawal dari definisi sempit menuju pengakuan peran aktor non-negara dalam diplomasi. Selain itu, di akhir bagian ini diulas definisi *new diplomacy* dari Badie yang menjadi rujukan dalam menganalisis peran diplomasi aktor non-negara dimana kebijakan luar negeri negara dan aktor non-negara dipahami sebagai praktik antarsosial untuk mencapai tujuan tertentu;⁹ dan juga definisi *new transnational activism* dari Sidney Tarrow yang menjadi rujukan dalam menganalisis kemampuan jejaring aktor non-negara dalam tiga faktor yakni dalam memanfaatkan *opportunity spirals*, membangun *institutionalization*, dan menerapkan *socialization* dalam mempengaruhi dunia internasional.¹⁰

Dalam sejarahnya, definisi diplomasi yang sempit sering kali memunculkan perdebatan, terutama karena evolusi sistem dunia yang semakin melibatkan beragam aktor dan isu yang lebih kompleks. Secara umum, terdapat dua kutub utama dalam memahami diplomasi. Di satu sisi, diplomasi diartikan *sebagai praktik negara yang memanfaatkan modal kekuatan baik ekonomi, militer, maupun kemampuan negosiasi diplomatnya untuk memajukan kepentingan nasional di arena hubungan antarnegara*.¹¹ Pandangan ini telah mengakar dan menjadikan diplomasi sebagai suatu mekanisme formal yang terstandarisasi. Akibatnya, praktik diplomasi cenderung didefinisikan secara sempit sebagai interaksi antarnegara dalam kerangka formal demi mengejar kepentingan nasional.

⁸ Badie, B. 2017. “Transnationalizing Diplomacy in a Post-Westphalian World,” dalam Kerr, P., dan Wiseman, G. (eds.), *Diplomacy in a Globalizing World: Theories and Practices*, Oxford University Press, Oxford; Tarrow, S., 2005, *The New Transnational Activism*, Cambridge University Press, New York.

⁹ Badie, B. 2017. “Transnationalizing Diplomacy in a Post-Westphalian World,” dalam Kerr, P., dan Wiseman, G. (eds.), *Diplomacy in a Globalizing World: Theories and Practices*, Oxford University Press, Oxford.

¹⁰ Tarrow, S., 2005, *The New Transnational Activism*, Cambridge University Press, New York.

¹¹ Lihat Satow, E., 1917, *A Guide to Diplomatic Practice*, Longmans, Green & Co, London; Nicolson, H, 1939. *Diplomacy*, Oxford University Press, London; Watson, A., 2005, *Diplomacy: The Dialogue Between States*, Taylor & Francis, New York.

Pandangan tradisional ini tidak terlepas dari warisan pemikiran *Clausewitzian* yang memposisikan diplomasi dan perang dalam satu spektrum tindakan negara. Clausewitz menyatakan bahwa “perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain,” yakni bentuk diplomasi yang lebih keras melalui kekuatan bersenjata.¹² Dalam konteks ini, diplomasi menjadi mekanisme transisi dari konflik menuju perdamaian. Sejarah memperlihatkan bahwa diplomasi memainkan peran penting dalam mengakhiri perang besar, seperti Perjanjian Versailles pasca-Perang Dunia I, atau pertemuan Teheran-Yalta-Potsdam menjelang akhir Perang Dunia II. Bahkan pembentukan Komunitas Batubara dan Baja Eropa oleh Robert Schuman dapat dilihat sebagai bentuk awal diplomasi ekonomi yang kemudian berkembang menjadi Uni Eropa.

Walaupun pada akhirnya diplomasi berkaitan dengan kegiatan yang terlihat sangat luwes dan dalam spektrum yang sangat lebar (bahkan merujuk pada seluruh kegiatan selain aksi perang), pandangan tradisional ini menempatkan diplomasi dalam institusi yang rigid dengan aturan, struktur, dan prosedur tertentu. Dalam pandangan Satow, misalnya, menyebut diplomasi sebagai “penerapan kecerdasan dan taktik dalam hubungan resmi antarnegara yang berdaulat, atau secara ringkas, pengelolaan urusan antarnegara dengan cara damai.”¹³ Pandangan ini menegaskan bahwa diplomasi identik dengan tindakan para diplomat sebagai representasi negara dalam upaya mencapai kesepakatan di tingkat internasional. Hal ini sejalan dengan praktik kenegaraan pasca Traktat Westphalia 1648 yang menekankan keutamaan posisi “negara-bangsa” sebagai entitas utama dalam hubungan internasional.

Dari uraian tersebut di atas, dua pemahaman kunci tentang pandangan tradisional mengenai diplomasi dapat ditarik. Pertama, diplomasi adalah alat penting negara dalam meredakan konflik dan membentuk kerja sama internasional. Proses ini dilakukan melalui negosiasi multilateral dan penyusunan rezim internasional yang merupakan hasil dari proyeksi pengaruh dan kekuasaan negara. Kedua, diplomasi juga menjadi sarana penyebaran ideologi dan nilai-nilai politik, seperti yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson, melalui “Fourteen Points”-nya yang menekankan prinsip kebebasan, hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*), serta pembentukan Liga Bangsa-Bangsa.¹⁴

Sebagai implikasi dari pandangan tradisional mengenai diplomasi, semangat Konferensi Bandung diletakkan sebagai manifestasi keberhasilan para diplomat dan pemimpin negara dalam menyepakati “Dasasila Bandung” sebagai landasan dan rujukan aksi negara-negara berkembang di masa tersebut.¹⁵ Konferensi tersebut menjadi tonggak dalam sejarah dunia internasional yang menggambarkan keberhasilan diplomasi negara-negara berkembang yang pada saat itu berupaya independen dari pertarungan ideologi yang ada, menjalin semangat solidaritas, serta menjadi lokus penting dalam kristalisasi norma internasional yang berlaku diantara negara-negara berkembang.¹⁶ Di era kontemporer, Konferensi Bandung bahkan menjadi rujukan dari praktik Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular bagi banyak negara berkembang seperti Indonesia.¹⁷

Namun di sisi lain, praktik diplomasi dapat dimaknai dengan cara yang berbeda dari pemahaman tradisional di atas, terutama dalam mengakui keterlibatan aktor-aktor non-negara dalam

¹² Clausewitz, C., 1832, *On War*, dialihbahasa oleh Michael Howard dan Peter Paret, Oxford University Press, New York.

¹³ Satow, E., 1917, *A Guide to Diplomatic Practice*, Longmans, Green & Co, London.

¹⁴ Reed, J., 2002, “Why is the USA not a Like-Minded Country? Some Structural Notes and Historical Considerations,” dalam Cooper, A. F., English, J., & Thakur, R. (eds.), *Enhancing Global Governance: Towards a New Diplomacy?*, United Nations University Press, New York.

¹⁵ Fitzgerald, C. P., 1955. “East Asia after Bandung,” *Far Eastern Survey*, 24(8); Berger, M. T., 2004, *The Battle for Asia: From Decolonization to Globalization*, Routledge Curzon, London.

¹⁶ Lihat Acharya, A., 2009, *Whose Ideas Matter? Agency and Power in Asian Regionalism*, ISEAS, Singapore

¹⁷ Apresian, S. R., 2016, “Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Sebagai Instrumen Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Global”, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(2).

domain publik yang semakin signifikan.¹⁸ Sejalan dengan perkembangan keilmuan Hubungan Internasional yang mengedepankan solidaritas dan pluralitas aktor politik, lembaga-lembaga multilateral dan aktor-aktor non-negara juga mulai memainkan peran penting dalam mempengaruhi kebijakan internasional, terutama pada isu-isu lintas negara seperti krisis kemanusiaan, lingkungan, dan keadilan global. Praktik keterlibatan aktor non-negara mulai muncul semenjak Perang Dingin dan mulai merebak sejalan dengan sistem global yang makin multipolar. Hal ini dapat dilihat dari fenomena *sans-frontierisme* atau gerakan lintas batas seperti *Médecins Sans Frontières*¹⁹ yang mulai berdiri di tahun 1970-an hingga keterlibatan tokoh seperti Bono dalam kampanye penghapusan utang Afrika di awal 2000-an,²⁰ memperlihatkan bentuk dan cara pandang diplomasi baru yang tidak hanya bersandar pada kekuatan negara.

Kemunculan cara pandang diplomasi baru (*new diplomacy*) mencerminkan reaksi terhadap keterbatasan negara dalam menjawab isu global. Diplomasi diartikan *sebagai jaringan antara aktor-aktor negara dan aktor-aktor non-negara yang secara aktif membentuk hubungan transnasional dan menggunakan strategi komunikasi, advokasi, hingga mobilisasi publik untuk mempengaruhi kebijakan negara maupun lembaga internasional*.²¹ Aktivitas-aktivitas dari berbagai aktor inilah yang menandai proliferasi jalur-jalur diplomasi dan memaknai ulang diplomasi yang selama ini dimonopoli oleh aparatus perwakilan negara.²²

Secara khusus Badie, menekankan karakter diplomasi baru, yakni: (1) pengakuan bahwa negara dan aktor non-negara memiliki peran dalam diplomasi; (2) penekanan praktik antarsosial dan antarkultur yang dapat memobilisasi aktor-aktor baru serta instrumen-instrumen baru untuk mencapai tujuan tertentu di ranah internasional.²³ Dengan kata lain, diplomasi baru ini tidak hanya menysar kebijakan luar negeri negara, tetapi juga mencakup pengaruh pada komunitas non-negara lainnya sebagai sebuah metode alternatif dari pendekatan diplomasi konvensional selama ini. Hasil dari kesadaran atas diplomasi baru ini adalah kompleksitas *diplomacies* di dunia kontemporer, yakni aksi diplomasi dimaknai secara jamak karena berbagai aktor dapat berinteraksi secara sporadis dan simultan dengan strategi yang beragam.²⁴

Implikasi cara pandang diplomasi baru ini dalam memahami Konferensi Bandung adalah penghargaan pada bukan pencapaian elit diplomat dari negara-negara peserta, tetapi juga sebagai titik tolak keterlibatan masyarakat sipil dalam diplomasi global. Semangat Bandung bukan semata hasil negosiasi elite politik, melainkan juga resonansi dari gerakan transnasional yang muncul di luar struktur negara. Keterlibatan organisasi seperti AAJA dan AAPSO adalah representasi konkret dari praktik *new diplomacy*. Keduanya membentuk koalisi lintas negara (*transnational coalition*) yang dibangun atas dasar klaim dan aspirasi bersama antaraktornya. Mengacu pada teori *new transnational activism* dari Sidney Tarrow,²⁵ keberhasilan koalisi seperti AAJA dan AAPSO ditentukan oleh tiga faktor: *opportunity spirals*, *institutionalization*, dan *socialization*. Ketiga faktor ini dapat membantu memahami bentuk aktivitas *diplomacies* yang dilakukan dan kemampuan jejaring organisasi

¹⁸ Lihat Effendi, T. D., 2013, "Diplomasi Publik Sebagai Pendukung Hubungan Indonesia-Malaysia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Internasional*, 9(1).

¹⁹ Siméant, J., 2005. "What Is Going Global? The Internationalization of French NGOs 'Without Borders'," *Review of International Political Economy*, 12(5).

²⁰ Cohen, M. A., & Küpçü, M. F., 2005, "Privatizing Foreign Policy," *World Policy Journal*, 22 (3).

²¹ Minear, L., & Smith, H., 2007, *Humanitarian Diplomacy: Practitioners and Their Craft*, United Nations University Press, New York.

²² Diamond, L., & McDonald, J., 1996, *Multi-track Diplomacy: A System Approach to Peace*, Kumarian Press, Sterling; Bolewski, W., 2007, *Diplomacy and International Law in Globalized Relations*, Springer, Berlin.

²³ Badie, B. 2017. "Transnationalizing Diplomacy in a Post-Westphalian World," dalam Kerr, P., dan Wiseman, G. (eds.), *Diplomacy in a Globalizing World: Theories and Practices*, Oxford University Press, Oxford.

²⁴ Derian, J. D., 1987, "Mediating Estrangement: A Theory for Diplomacy," *Review of International Studies*, 13(2).

²⁵ Tarrow, S., 2005, *The New Transnational Activism*, Cambridge University Press, New York.

masyarakat sipil dalam mempengaruhi dunia internasional.

Secara khusus, *opportunity spirals* merupakan gambaran di mana ketika jejaring organisasi masyarakat sipil terbentuk, ia membuat peluang bagi ide yang diusung oleh koalisi yang bersangkutan. Dalam perjalanannya, peluang-peluang tersebut secara dinamis berubah seiring dengan “biaya koalisi.” Dengan demikian, ketahanan koalisi sangat tergantung pada kemampuannya memanfaatkan peluang-peluang ini. Kemudian, konsep *institutionalization* menekankan pentingnya proses kelembagaan agar energi gerakan tidak terfragmentasi. Sehingga, pada prinsipnya, koalisi organisasi masyarakat sipil lintas negara perlu memelihara kesatuan publik sembari mengakomodasi keragaman internal dan juga menyalurkan energi kreatif yang sebelumnya sporadis dan terdesentralisasi menjadi terorganisir dan terarah. Di sisi lain, *socialisation* adalah proses di mana aktor-aktor dengan latar belakang berbeda membangun solidaritas melalui interaksi lintas budaya dan pengalaman global, menciptakan semangat kosmopolitanisme yang berakar secara lokal (*rooted cosmopolitanism*).²⁶

Dengan demikian, memahami diplomasi di Asia-Afrika pasca-Konferensi Bandung menuntut kita untuk melihat melampaui peran negara. Diplomasi tidak lagi hanya merupakan alat negosiasi elite, tetapi telah menjadi arena terbuka bagi berbagai aktor non-negara yang memperjuangkan solidaritas, keadilan, dan transformasi tatanan global.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus komparatif untuk menganalisis dua organisasi non-negara yang memiliki keterkaitan historis dan ideologis dengan Konferensi Bandung, yakni AJAA dan AAPSO. Pemilihan kedua kasus ini bertujuan untuk memahami dinamika praktik diplomasi baru (*new diplomacy*) dan juga karakter *new transnational activism* yang dijalankan oleh aktor non-negara dari negara-negara Global South dalam konteks pasca-Konferensi Bandung. Kedua organisasi lahir pasca Konferensi Bandung namun seiring waktu memiliki peran dan kemampuan untuk bertahan yang berbeda. AAJA mengalami kevakuman dan akhirnya meredup di awal 1970-an, namun AAPSO tetap mampu bertahan hingga hari ini. Perbandingan atas kedua organisasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakter dan peran masing-masing aktor non-negara dalam berdiplomasi dan menjalankan aktivitasnya.

Secara metodologis, pendekatan komparatif dalam studi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam pola aktivisme transnasional yang dijalankan kedua organisasi tersebut. Pendekatan ini penting untuk menilai bagaimana masing-masing organisasi merespons dinamika politik global, serta bagaimana keberhasilan atau kegagalan mereka dapat ditelusuri melalui strategi kelembagaan dan pilihan-pilihan diplomatik yang diambil. Komparasi dua studi kasus dalam penelitian ini mengikuti panduan komparatif yang menekankan “*the logic of comparison*” sebagai cara untuk mengembangkan penjelasan kausal dan membangun generalisasi terbatas atas fenomena sosial-politik yang diteliti.²⁷

Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan *process tracing*. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen primer dan sekunder terkait Konferensi Bandung, AAJA, dan AAPSO, termasuk naskah konferensi, pernyataan resmi organisasi, dan literatur akademik yang relevan. Dengan pendekatan ini, tulisan berupaya menangkap konstruksi makna, nilai, dan narasi yang dikembangkan oleh kedua organisasi dalam kerangka diplomasi pascakolonial. Sementara itu, *process tracing* digunakan untuk merekonstruksi secara historis urutan peristiwa penting yang membentuk jalannya diplomasi non-negara dalam kedua

²⁶ Tarrow, S., 2005, *The New Transnational Activism*, Cambridge University Press, New York.

²⁷ George, A. L., & Bennett, A., 2005, *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*, MIT Press, Cambridge.

organisasi tersebut, mulai dari pembentukan, dinamika internal, adaptasi terhadap konteks politik internasional, hingga keberlangsungan atau kemunduran organisasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Checkel, *process tracing* memungkinkan peneliti untuk menelusuri hubungan kausal secara lebih mendalam melalui pelacakan dinamika mikro di dalam kasus yang diteliti. Metode ini berguna dalam memahami bagaimana peluang politik, proses institusionalisasi, dan strategi sosialiasi terbentuk dan memengaruhi daya tahan organisasi.²⁸

Penggunaan metode studi literatur dan *process tracing* juga cocok dengan orientasi teoritik artikel ini yang mengacu pada pendekatan *new diplomacy* dan *new transnational activism*. Kedua kerangka ini menekankan pentingnya tindakan strategis aktor non-negara dalam menjawab dinamika global melalui pembentukan jaringan lintas batas, advokasi isu, dan diplomasi publik. Dalam konteks ini, *process tracing* membantu mengungkap kondisi-kondisi kausal yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan aktor non-negara dalam mempertahankan relevansi politik mereka di ranah internasional.

Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini secara eksplisit bertujuan untuk menggambarkan bagaimana warisan Konferensi Bandung tidak hanya dimanifestasikan dalam diplomasi negara, tetapi juga dalam bentuk diplomasi alternatif yang dijalankan oleh aktor non-negara. Pemilihan literatur yang beragam dan rekonstruksi proses historis memungkinkan artikel ini memberikan kontribusi empirik dan teoritik yang kuat dalam diskusi tentang transformasi diplomasi global dari Global South.

Analisis

a. Diplomasi AAJA dan AAPSO

Kemunculan Konferensi Asia-Afrika dan lahirnya semangat Dasasila Bandung memang dipelopori oleh aktor-aktor negara (*state actors*), di mana praktik diplomasi pada masa itu erat kaitannya dengan peran pemerintah dan militer. Der Derian bahkan menyebutnya sebagai diplomasi yang “*macho*,”²⁹ mencerminkan dominasi maskulin dan militeristik dalam pengambilan kebijakan luar negeri.

Namun, hal yang menarik sejalan dan pasca Konferensi Bandung adalah munculnya berbagai organisasi non-pemerintah yang terbentuk melalui pertemuan lintas negara. Beberapa diantaranya adalah: *Afro-Asian Peoples' Solidarity Conference* yang diinisiasi pada tahun 1958 di Kairo, *Afro-Asia Writers Conference* yang diinisiasi pada tahun 1958 di Tashkent, *Afro-Asia Jurist Conference* yang diinisiasi pada tahun 1962 di Conakry, dan *Afro-Asia Journalist Conference* yang diinisiasi pada tahun 1963 di Jakarta. Kelahiran pertemuan-pertemuan ini mencerminkan pergeseran penting: diplomasi yang sepenuhnya didominasi negara meluas menjadi diplomasi yang melibatkan aktor-aktor non-negara.

Dalam konteks selama dan pasca-Konferensi Bandung, nilai-nilai yang ditekankan dalam Dasasila Bandung, terutama solidaritas dan kebersamaan antar bangsa, menjadi landasan moral bagi aktor-aktor non-negara untuk berpartisipasi aktif dalam diplomasi. Terdapat tiga bentuk utama dari praktik diplomasi yang dijalankan oleh jaringan ini, yakni: komunikasi dan pengumpulan fakta (*fact-finding*), aktivitas tekanan (*pressure activities*), dan advokasi. Tulisan ini akan mengulas dua organisasi utama yang lahir dari proses tersebut, yaitu *Afro-Asian Journalist Association* (AAJA) yang bermula dari *Afro-Asian Journalist Conference*, dan *Afro-Asian People's Solidarity Organization* (AAPSO) yang terbentuk dari *Afro-Asian People's Solidarity Conference*.

²⁸ Checkel, J. T., 2005, “It’s the Process Stupid! Process Tracing in the Study of European and International Politics.” *ARENA Working Paper Series*, No. 26. Centre for European Studies, University of Oslo, Oslo.

²⁹ Derian, J. D., 1987, “Mediating Estrangement: A Theory for Diplomacy,” *Review of International Studies*, 13(2).

a. *Afro-Asian Journalist Association (AAJA)*

AAJA pertama kali digagas pada 1962 dalam Kongres *International Journalist Organization* (IOJ) di Budapest, Hungaria. Delegasi wartawan Indonesia, seperti Ayik Umar Said dan Joesoef Isaak, menggalang dukungan dari perwakilan Asia dan Afrika. Kongres pertama AAJA berlangsung di Jakarta pada 24 April–1 Mei 1963 dan menetapkan Jakarta sebagai sekretariat utamanya. Kepengurusan terdiri dari lima negara Afrika, yakni Aljazair, Mali, Afrika Selatan, Tanzania, Guinea, dan lima negara Asia, yakni Indonesia, Sri Lanka, Suriah, Tiongkok, Jepang.³⁰

AAJA dikenal sangat aktif di dunia internasional, terutama karena mengeluarkan pemberitaan pernyataan sikap (*issues statement*) dan melakukan kunjungan langsung ke negara-negara yang sedang menghadapi peperangan menghadapi kolonialisme, imperialisme, dan neokolonialisme. Kegiatan ini menunjukkan fungsi komunikasi dan *fact-finding* dalam kerangka *new diplomacy*. Sebagian besar resolusi yang dihasilkan AAJA lebih berfokus pada dukungan solidaritas terhadap gerakan antikolonial dan kecaman pada negara-negara imperialis.³¹ Selain mengeluarkan *issues statement*, AAJA juga melakukan kunjungan langsung ke kawasan dan negara-negara yang sedang mengalami pergolakan, baik untuk mencapai kemerdekaan maupun telah merdeka namun masih berupaya melepaskan diri dari pengaruh kolonialisme dan imperialisme negara lain. Hal ini antara lain terjadi pada tahun 1967, ketika delegasi AAJA berkunjung ke beberapa negara di kawasan Timur Tengah. Tujuan dari kunjungan ini terutama adalah menunjukkan serta menggalang dukungan terhadap rakyat Palestina dan upaya mereka untuk mencapai kemerdekaan nasional yang sejati.³²

Karakter diplomasi baru yang dilakukan AAJA termanifestasikan dalam fungsi komunikasi dan *fact-finding* yang dilakukannya. Sebagai sebuah asosiasi jurnalis, AAJA memiliki peran untuk untuk menerima dan menyebarkan informasi yang mereka terima tanpa perlu dibatasi oleh pertimbangan-pertimbangan sensitifitas negara. Dalam bukunya, Umar Said menunjukkan bahwa pada tahun 1967 AAJA mengunjungi organisasi-organisasi wartawan di Suriah, Mesir, Aljazair, Maroko, Senegal, Mali, Guinea, Sierra Leone, dan Kongo.³³ Kunjungan tersebut menunjukkan peran penting dalam membangun solidaritas antarbangsa dan menggalang dukungan antikolonial secara langsung, tanpa melalui perantara pemerintah.

Meskipun demikian, dinamika politik dalam negeri Indonesia pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 menyebabkan instabilitas yang berujung pada pemindahan sekretariat AAJA ke Beijing. Hal ini secara berangsur-angsur memicu perubahan arah organisasi, yang pada akhirnya didominasi oleh pengaruh ideologis Tiongkok. Pemerintah Tiongkok memberikan dukungan finansial dan meregulasi kegiatan AAJA. AAJA tetap dapat melaksanakan berbagai tradisi kegiatannya, termasuk pelatihan yang diselenggarakan tiap tahun antara 1966 hingga 1971 di Tiongkok dan juga kegiatan kunjungan lainnya.³⁴ Namun, dalam konsistensi kegiatan yang dilaksanakan, AAJA berangsur-angsur kehilangan otonomi. Dalam pernyataan resminya, AAJA mendefinisikan diri sebagai “*executive organ of international organization with 47 communist or pro-communist member countries*”.³⁵

Alih alih memproyeksikan sebuah visi solidaritas Asia-Afrika yang berupaya mempengaruhi politik internasional seperti pada masa lalu, kegiatan AAJA menjadi semakin berorientasi ke dalam,

³⁰ Said, A.U., 2004, *Perjalanan Hidup Saya*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.

³¹ Zhou, T., 2019, “Global Reporting from the Third World: The Afro-Asian Journalists’ Association, 1963–1974,” *Critical Asian Studies*, 51(2).

³² Anonim, 1967, “*AAJA Delegations Report on Recent Tour*,” diakses 15 September 2022, <http://religionpub.lib.cuhk.edu.hk>.

³³ Said, A.U., 2004, *Perjalanan Hidup Saya*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.

³⁴ Zhou, T., 2019, “Global Reporting from the Third World: The Afro-Asian Journalists’ Association, 1963–1974,” *Critical Asian Studies*, 51(2).

³⁵ Hsieh, S., 1966. *About the Afro Asian Journalists’ Association*, diakses 15 September 2022, <https://repository.lib.cuhk.edu.hk/en/item/cuhk-3060058>.

dengan fokus semata mata pada sejauh mana pengalaman Tiongkok dapat diterapkan pada negara-negara Asia dan Afrika. AAJA berangsur angsur tidak mampu menampilkan persatuan Asia-Afrika melalui beragam liputan kritisnya, dan justru menjadi media untuk mendorong popularitas pemikiran Mao Zedong di seluruh dunia.³⁶ Ketika ide sosialisme-komunisme semakin menonjol, AAJA kehilangan daya jangkau sebagai organisasi inklusif. Hal ini pun akhirnya mendapat support yang semakin kecil dari negara-negara Asia dan Afrika.

AAJA pada akhirnya mulai meredup, terutama sejalan dengan diplomasi Tiongkok yang mencoba mengambil posisi yang lebih moderat dalam upaya menjauh dari Uni Soviet dan mendekat ke Amerika Serikat di tahun 1970-an. Hal ini semakin mengecilkan citra Tiongkok yang dianggap menjadi kaki tangan kaum imperialis dan tidak konsisten dalam memperjuangkan nilai ideologisnya. AAJA akhirnya tidak lagi beroperasi dengan catatan resmi terakhir muncul pada 1974. Upaya menghidupkan kembali organisasi ini dilakukan oleh AAPSO pada 2013 dengan membentuk *Afro-Asian Journalist Union*, namun dampaknya belum signifikan.

b. *Afro-Asian People's Solidarity Organization (AAPSO)*

Berbeda dengan AJAA, AAPSO memiliki sejarah dan mekanisme keberlanjutan yang lebih panjang. Organisasi ini resmi dibentuk dalam konferensi di Kairo, Mesir, pada akhir tahun 1957 hingga 1 Januari 1958 dan dikukuhkan namanya di konferensi kedua yang diadakan di Conakry, Guinea pada tahun 1960. AAPSO mendefinisikan diri sebagai sebuah organisasi non-negara dengan jaringan komite nasional di lebih dari 90 negara di kawasan Afrika dan Asia, dan memiliki *associate member committees* di Eropa dan Amerika Latin. AAPSO juga memiliki status konsultatif dengan berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). AAPSO juga memproklamirkan diri sebagai perpanjangan populer dari tujuan Konferensi Bandung.

AAPSO berfokus dalam menciptakan hubungan solidaritas ekonomi, politik, dan budaya dalam periode dekolonisasi yang sedang terjadi secara cepat di *Global South*.³⁷ AAPSO menyelenggarakan konferensi para penulis, perempuan, dan pemuda dari negara-negara Asia dan Afrika, serta menyelenggarakan seminar dan konferensi mengenai isu-isu penting yang berkaitan dengan perjuangan anti-imperialis. Dalam hal ini, AAPSO juga melakukan fungsi komunikasi dan *fact-finding*. Meskipun demikian, AAPSO juga terbuka untuk mengadvokasi isu-isu kebudayaan sehingga mampu menjangkau masalah-masalah yang *less sensitive* namun tetap berada dalam koridor solidaritas antarbangsa di Asia dan Afrika. Harus diakui, dibandingkan dengan AAJA, AAPSO cenderung tidak mengembangkan narasi konfrontasi ideologis yang tajam, dan lebih menekankan pada kerja sama budaya, solidaritas anti-kolonialisme, serta penguatan kesadaran global non-eksploitatif.

Pada tahun 1965, AAPSO pernah mengumumkan rencana untuk memasukkan kawasan Latin Amerika ke dalam wilayah kerja mereka karena terkait dengan isu-isu pemusnahan senjata nuklir. Walaupun bergabungnya Latin Amerika pada akhirnya hanya sebatas wacana dan tidak teralisasi, namun AAPSO tetap menaruh perhatian pada isu pemusnahan senjata nuklir.³⁸ AAPSO berupaya untuk menggalang kebersamaan dalam isu transnasional yang dihadapi banyak negara.

AAPSO mampu menjaga keberlangsungan karena bersifat inklusif dan tidak terjebak dalam dinamika politik blok. Mereka secara terbuka dan inklusif mengadvokasi baik isu *high-politics*

³⁶ Zhou, T., 2019, "Global Reporting from the Third World: The Afro-Asian Journalists' Association, 1963–1974," *Critical Asian Studies*, 51(2).

³⁷ Yoon, D. M., 2012, "The Global South and Cultural Struggles: On the Afro-Asian People's Solidarity Organization," *Journal of Contemporary Thought*, 35.

³⁸ Afro-Asia People Solidarity Organization, 2014, *Final Communiqué-AAPSO on Congress 2014*, diakses 14 September 2022, <http://www.aapsorg.org/en/enconferences/772-afo-asain-peoples-solidarity-organisation-aapso.html>.

maupun *low-politics*. AAPSO, misalnya, secara resmi mengkritik pemerintah Amerika Serikat yang memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem dan mengakui kota itu sebagai ibu kota Israel di tahun 2019.³⁹ AAPSO mengedepankan solidaritas bangsa yang terjajah dan mengkritik Amerika Serikat tidak memiliki niat untuk mengupayakan solusi yang adil berdasarkan prinsip dua negara. Di sisi lain, AAPSO juga mengadvokasikan isu perempuan saat hari perempuan internasional, terutama dalam mempromosikan akses pendidikan bagi perempuan. AAPSO menghimbau Perserikatan Bangsa Bangsa dan komunitas internasional untuk mendukung pemberdayaan politik perempuan dan mendorong keterwakilan perempuan yang memadai.⁴⁰ AAPSO menunjukkan fleksibilitas tinggi dalam merespons tantangan dan kesempatan yang tersedia serta mempertahankan proses kelembagaan terutama dalam merespon berbagai isu yang dihadapi negara-negara Asia dan Afrika.

c. Refleksi *New Diplomacy* dan *New Transnational Activism*

Perbedaan nasib antara AAJA dan AAPSO mencerminkan dinamika peluang dan tantangan yang dihadapi oleh aktor non-negara dalam menjalankan *new diplomacy*. AAJA gagal mempertahankan independensinya karena terjebak dalam polarisasi ideologis, sedangkan AAPSO justru tumbuh menjadi simpul solidaritas global berkat pendekatan yang lebih adaptif terhadap berbagai isu yang dihadapi negara-negara di Asia dan Afrika.

Dalam kerangka *new diplomacy*, fungsi komunikasi dan *fact-finding* yang dijalankan AAPSO sejatinya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan AAJA. Keduanya mengandalkan jaringan organisasi anggota di berbagai negara. Sebagai contoh, *African National Congress* (ANC) dari Afrika Selatan pernah menyampaikan pesan terbuka di situs AAPSO sebagai bentuk dukungan.⁴¹ Elemen aktivitas tekanan (*pressure activities*) dan advokasi keduanya juga berangkat dari komunikasi transnasional yang intensif.

AAPSO sedikit menonjol karena pemilihan isu budaya sebagai kanal diplomasi, yang memungkinkan jangkauan luas dari tataran mikro hingga makro. Contohnya adalah pendirian *Biro Penulis* AAPSO dan peluncuran antologi puisi tahun 1963 di Kolombo. Inisiatif ini merupakan upaya untuk menyediakan forum diskusi mengenai bentuk sastra dan estetika seperti apa yang layak dalam konteks anti-imperialis dan memungkinkan negosiasi budaya lintas negara yang kadang-kadang terlalu bergantung pada urgensi politik, sembari berusaha menentang asumsi epistemik dari modernisme Barat.⁴²

Baik AAJA dan AAPSO menunjukkan kapasitas untuk mengadvokasi kepentingannya di level internasional baik melalui pengaruh antar-negara berkembang di Asia dan Afrika, maupun lewat koordinasi dan pertukaran informasi lintas batas. Akan tetapi, keberlangsungan AAPSO kontras dengan kevakuman AAJA. Ini berkaitan langsung dengan pola diplomasi baru yang mereka kembangkan. AAJA mengalami transformasi dari semangat anti-kolonial warisan Konferensi Bandung menjadi kendaraan ideologi sosialis-komunis, terutama setelah pengaruh Tiongkok mendominasi organisasi. Sebaliknya, AAPSO mampu menjaga semangat warisan Konferensi Bandung dalam format yang lebih netral, lintas ideologi, dan terbuka bagi berbagai negara Global

³⁹ AAPSO, Final Statement 29th Meeting of Arab Solidarity Committees 27-28 March 2019, diakses 19 Desember 2025, <https://www.aapsorg.org/en/statments/954-final-statement-29th-meeting-of-arab-solidarity-committees-27-28-march-2019.html>.

⁴⁰ AAPSO, Statement on International Women's Day, diakses 19 Desember 2025, <https://www.aapsorg.org/en/statments/949-international-women%E2%80%99s-day-3.html>.

⁴¹ Tambo, O., 1971, Message to the Meeting of the Council of the Afro-Asian Solidarity Organization: Tripoli, *African National Congress*, diakses 15 September 2022, <http://www.anc.org.za/show.php?id=4310>.

⁴² Yoon, D. M., 2012, "The Global South and Cultural Struggles: On the Afro-Asian People's Solidarity Organization," *Journal of Contemporary Thought*, 35.

South.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan jejaring non-negara sangat bergantung pada tiga aspek utama: pertama, pemanfaatan kesempatan dalam membangun jejaring dengan negara dan aktor internasional lain; kedua, bentuk institutionalisasi kelembagaan dan struktur internalnya; dan ketiga, kemampuan sosialisasi nilai dan/atau norma yang dimiliki, terutama dalam membangun solidaritas melalui interaksi lintas budaya dan pengalaman global dan mengadvokasikan harapan ideologisnya.⁴³ Dalam aspek *opportunity spirals* dalam membangun jejaring organisasi masyarakat sipil, AAJA dan AAPSO menunjukkan kemiripan dalam memanfaatkan spirit Konferensi Bandung untuk membangun solidaritas antar aktor non-negara dalam berbagai sektor. Kedua organisasi juga mampu mendorong kolaborasi dan komunikasi dengan perwakilan negara dalam mendorong advokasinya.

Dalam aspek kelembagaan dan struktur internal, AAJA dan AAPSO memiliki perbedaan. AAPSO memiliki jaringan organisasi yang lebih luas dan mampu tetap berjalan beriringan dengan negara. Hal ini sejalan dengan komitmen inklusifnya untuk membantu menyuarakan berbagai aspirasi dari berbagai bangsa. AAJA, di sisi lain, mengalami transisi. Di awal pendiriannya, AAJA bervisi internasional dan menyuarakan kepentingan banyak bangsa. Namun ketika harus berpindah sekretariat organisasinya dari Indonesia ke Tiongkok dan lambat laun semakin dipengaruhi oleh kepentingan Tiongkok sebagai negara tuan rumahnya, AAJA menjadi rapuh dan tidak mampu menjadi medium yang inklusif bagi semua aspirasi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika.⁴⁴

Dalam aspek kemampuan sosialisasi nilai dan/atau norma, AAJA dan AAPSO menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. AAPSO dapat bertahan karena bersifat inklusif dalam mengangkat isu *high-politics* dan *low-politics*, yang membuatnya terbuka dalam berbagai isu seperti solidaritas sosial dan budaya, serta mampu menjaga netralitas dan rasa saling percaya di antara anggotanya. Sementara itu, AAJA hanya berfokus pada isu *high-politics*, seperti mobilisasi opini media dalam mengkritik imperialisme dan neo-kolonialisme, yang membuka ruang bagi intervensi kekuatan besar.

Diplomasi baru menekankan pentingnya praktik interaksi antarsosial dan antarkultur yang berwujud kemampuan menyesuaikan bentuk dan substansinya sesuai konteks.⁴⁵ AAJA gagal beradaptasi dengan dunia kontemporer: tidak menyediakan pelatihan jurnalistik, tidak memperbarui standar profesionalisme, dan terlalu terseret dinamika ideologis. Sebaliknya, AAPSO terus berkembang melalui pendekatan *de-occidentalization*, yakni mengembangkan modernitas alternatif yang berbasis solidaritas global non-eksploitatif.⁴⁶ AAPSO juga memanfaatkan interaksi dengan berbagai organisasi lain dan terus memperkuat struktur organisasionalnya melalui kongres rutin dan pernyataan resmi. AAPSO berhasil menjadi bagian dari beberapa badan internasional (ECOSOC, UNCTAD, UNESCO), dan memiliki status pengamat di Gerakan Non-Blok dan African Commission on Human and People's Rights.

Kesimpulan

Belajar dari Konferensi Bandung, kita dapat melihat bahwa peristiwa tersebut bukan hanya momen keberhasilan diplomasi negara, melainkan juga menjadi pemantik munculnya diplomasi alternatif oleh aktor non-negara. Warisan Konferensi Bandung tidak hanya hidup dalam perjanjian

⁴³ Tarrow, S., 2005, *The New Transnational Activism*, Cambridge University Press New York.

⁴⁴ Said, A.U., 2004, *Perjalanan Hidup Saya*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.

⁴⁵ Badie, B. 2017. "Transnationalizing Diplomacy in a Post-Westphalian World," dalam Kerr, P., dan Wiseman, G. (eds.), *Diplomacy in a Globalizing World: Theories and Practices*, Oxford University Press, Oxford.

⁴⁶ Yoon, D. M., 2012, "The Global South and Cultural Struggles: On the Afro-Asian People's Solidarity Organization," *Journal of Contemporary Thought*, 35.

antarnegara, tetapi juga dalam bentuk resonansi solidaritas melalui jaringan transnasional dari aktor-aktor non-negara yang lahir setelah konferensi tersebut.

Pengalaman dari dua studi kasus, yakni AAPSO dan AAJA, menunjukkan bahwa aktor non-negara dapat memainkan peran penting dalam *new diplomacy* melalui komunikasi lintas batas, advokasi, dan pembentukan jaringan internasional. Walaupun tidak semua jejaring mampu bertahan, artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan diplomasi non-negara bukan semata diukur dari daya tahannya, tetapi dari kemampuannya membaca konteks, membentuk institusi, dan menjaga otonomi geraknya.

Dalam kasus AAJA, kegagalan dalam mengedepankan aktivisme transnasional muncul dalam berbagai hal berikut: (1) pergeseran basis gerakan dan kegagalan institusionalisasi diri, terutama setelah didominasi oleh pengaruh tokoh-tokoh dari Tiongkok; (2) ketidakmampuan untuk terus menjadi medium yang inklusif bagi aspirasi bangsa-bangsa Asia dan Afrika. AAJA tidak berkembang dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia kontemporer, organisasi tersebut tidak menyediakan kesempatan bagi para anggotanya untuk meningkatkan standar profesionalitas melalui pelatihan-pelatihan jurnalistik dan semacamnya. Sementara itu, AAPSO, menunjukkan beberapa karakter lain: (1) organisasi ini mampu menekankan pada aspek-aspek budaya dalam memaknai anti-imperialisme daripada sekedar melakukan penolakan terhadap Blok Barat;⁴⁷ (2) kemampuannya untuk berkembang dan mengambil kesempatan yang tersedia, terutama dalam isu ‘*people solidarity*’ yang cukup luas dan mampu mereka ikuti perkembangannya; (3) proses institusionalisasi yang lebih tertata, baik melalui penyelenggaraan kongres dan kemampuan menjadi bagian dari *consultative status* beberapa badan internasional lainnya. Dengan demikian, kontribusi aktor non-negara dalam menghidupkan warisan Bandung sangat layak diakui sebagai bagian penting dari transformasi praktik diplomasi global.

Acknowledgement:

Penulis berterima kasih kepada Saudari Oktavi Andaresta yang telah membantu dalam pengumpulan data dalam penulisan artikel ini.

Referensi

- Acharya, A, 2009, *Whose Ideas Matter? Agency and Power in Asian Regionalism*, ISEAS, Singapore.
- Afro-Asia People Solidarity Organization, 2014, *Final Communiqué-AAPSO on Congress 2014*, diakses 14 September 2022, <http://www.aapsorg.org/en/enconferences/772-afo-asain-peoples-solidarity-organisation-aapso.html>.
- Anonim, 1967, “*AAJA Delegations Report on Recent Tour*,” diakses 15 September 2022, <https://repository.lib.cuhk.edu.hk/tc/item/cuhk-3060251>.
- Apresian, S. R., 2016, “Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Sebagai Instrumen Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Global”, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(2).
- Badie, B. 2017. “Transnationalizing Diplomacy in a Post-Westphalian World,” dalam Kerr, P., dan Wiseman, G. (eds.), *Diplomacy in a Globalizing World: Theories and Practices*, Oxford University Press, Oxford.
- Berger, M. T, 2004, *The Battle for Asia: From Decolonization to Globalization*, Routledge Curzon, London.

⁴⁷ Yoon, D. M., 2012, “The Global South and Cultural Struggles: On the Afro-Asian People’s Solidarity Organization,” *Journal of Contemporary Thought*, 35.

- Bolewski, W., 2007, *Diplomacy and International Law in Globalized Relations*, Springer, Berlin.
- Checkel, J. T., 2005, "It's the Process Stupid! Process Tracing in the Study of European and International Politics." *ARENA Working Paper Series*, No. 26. Oslo: Centre for European Studies, University of Oslo, Oslo.
- Clausewitz, C., 1832, *On War*, dialihbahasa oleh Michael Howard dan Peter Paret, Oxford University Press, New York.
- Cohen, M. A., & Küpçü, M. F., 2005, "Privatizing Foreign Policy," *World Policy Journal*, 22 (3).
- Derian, J. D., 1987, "Mediating Estrangement: A Theory for Diplomacy," *Review of International Studies*, 13(2).
- Diamond, L., & McDonald, J., 1996, *Multi-track Diplomacy: A System Approach to Peace*, Kumarian Press, Sterling.
- Effendi, T. D., 2013, "Diplomasi Publik Sebagai Pendukung Hubungan Indonesia-Malaysia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Internasional*, 9(1).
- Fitzgerald, C. P., 1955. "East Asia after Bandung," *Far Eastern Survey*, 24(8).
- George, A. L., & Bennett, A., 2005, *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*, MIT Press, Cambridge.
- Herrera, R., 2005, "Fifty Years after the Bandung Conference: Towards a Revival of the Solidarity between the Peoples of the South? Interview with Samir Amin," *Inter-Asia Cultural Studies*, 6(4).
- Hsieh, S., 1966. *About the Afro Asian Journalists' Association*, diakses 15 September 2022, <https://repository.lib.cuhk.edu.hk/en/item/cuhk-3060058>.
- Huei, P. Y., 2009, "The Four Faces of Bandung: Detainees, Soldiers, Revolutionaries and Statesmen," *Journal of Contemporary Asia*, No. 39(1).
- Lee, C., 2005, "'Bandung and Beyond': Rethinking Afro-Asian Connections during the Twentieth Century," *African Affairs*, 104(417).
- Miner, L., & Smith, H., 2007, *Humanitarian Diplomacy: Practitioners and Their Craft*, United Nations University Press, New York.
- Nicolson, H., 1939. *Diplomacy*, Oxford University Press, London.
- Pauker, G. J., 1965, "The Rise and Fall of Afro-Asian Solidarity," *Asian Survey*, 5(9).
- Reed, J., 2002, "Why is the USA not a Like-Minded Country? Some Structural Notes and Historical Considerations," dalam Cooper, A. F., English, J., & Thakur, R. (eds.), *Enhancing Global Governance: Towards a New Diplomacy?*, United Nations University Press, New York.
- Said, A.U., 2004, *Perjalanan Hidup Saya*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
- Satow, E., 1917, *A Guide to Diplomatic Practice*, Longmans, Green & Co, London.
- Siméant, J., 2005. "What Is Going Global? The Internationalization of French NGOs 'Without Borders'," *Review of International Political Economy*, 12(5).
- Tambo, O., 1971, Message to the Meeting of the Council of the Afro-Asian Solidarity Organization: Tripoli, *African National Congress*, diakses 15 September 2022, <http://www.anc.org.za/show.php?id=4310>.
- Tarrow, S., 2005, *The New Transnational Activism*, Cambridge University Press New York.
- Walker, D., 2005, "Nervous Outsider," *Australian Historical Studies*, No. 36(125).
- Watson, A., 2005, *Diplomacy: The Dialogue Between States*, Taylor & Francis, New York.
- Yoon, D. M., 2012, "The Global South and Cultural Struggles: On the Afro-Asian People's Solidarity Organization," *Journal of Contemporary Thought*, 35.
- Zhou, T., 2019, "Global Reporting from the Third World: The Afro-Asian Journalists' Association,

1963–1974,” *Critical Asian Studies*, 51(2).